

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat telah memperjuangkan suatu reformasi, sehingga reformasi tersebut membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Satu diantaranya yaitu mengesahkan sejumlah kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dan akuntabilitas yang lebih besar atas sumber daya masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban publiknya. Sebagai dasar perubahan fundamental dari reformasi di bidang keuangan maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dilanjutkan dengan penetapan standar dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Peranan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri, pemerintah juga telah membuat suatu aturan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

Daerah. Dengan adanya agenda reformasi pemerintah mengenai pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan suatu proses terhadap keterlibatan dari segenap unsur dan lapisan masyarakat, untuk dapat memberikan wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Sehingga aspirasi dari masyarakat dapat tercapai setempat bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Pemerintah pusat sebagai katalisator dan fasilitator merupakan pihak yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, yang selanjutnya disebut dengan Permendagri 59, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap pemerintah daerah harus dapat

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah yang diperjelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan APBD dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan sebagai dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan. Di samping kebijakan akuntansi, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi dari Permendagri 59 Tahun 2007 di mana setiap SKPD harus menyusun laporan keuangannya masing-masing.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 265 ayat (1) menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi a. Laporan realisasi anggaran;

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

b. Neraca SKPD; c. Catatan atas laporan keuangan SKPD dan berdasarkan Pasal 290 ayat (1), (2) dan (3) yang intinya menyatakan bahwa Kepala SKPD harus menyampaikan laporan realisasi anggaran sebanyak dua kali setahun yakni semester pertama (Januari sampai dengan Juni) yang menerangkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai dengan prognosis untuk enam bulan berikutnya paling lama tujuh hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya Kepala SKPD menyampaikan laporan tahunan yang dimulai dari periode Januari sampai dengan Desember tahun anggaran. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD sebagai berikut:

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD – SKPD



Gambar 1.1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - SKPD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi

sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Khusus dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah di samping harus memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM, komitmen dan perangkat pendukung yang mampu dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari penelitian yang dilakukan Azhar tahun 2007 pada Pemerintah Kota Banda Aceh menyimpulkan bahwa regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pengaruh faktor regulasi, komitmen, SDM, dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 terlihat juga masih rendah, hal ini terbukti dari adanya penyelesaian proses penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri 59 Tahun 2007 pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang menggunakan faktor regulasi, komitmen, SDM, dan perangkat pendukung sebagai faktor-faktor akan mendukung keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan Permendagri 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: Apakah regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung secara parsial dan simultan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan untuk dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh regulasi, komitmen, SDM dan perangkat pendukung terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- c. Bagi calon peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang sejenis.

1.5. Originalitas

Penelitian tentang laporan keuangan pemerintah daerah merupakan replikasi penelitian, yang dilakukan oleh Azhar (2007) meneliti Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) pada Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai variabel dependen dengan Regulasi, Komitmen, SDM, dan Perangkat pendukung sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian yang dilakukan Azhar dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan periode waktu penelitian. Azhar melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 di Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2007. Pada penelitian ini, lokasi dan periode waktu penelitian dilakukan pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri 59 Tahun 2007.

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Universitas Sumatera Utara